PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI MELALUI JUMLAH WAJIB PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK (Survei Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Periode 2012-2016)

Oleh :
Sulis Triani
21113009

Pembimbing :
Prof.Dr.Hj.Umi Narimawati, Dra., SE., M.Si

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

Abstrak: Fenomena yang terjadi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I, jumlah wajib pajak di wilayah KPP cenderung meningkat sedangkan penerimaan penghasilan orang pribadi menurun. Surat paksa yang dikeluarkan KPP cenderung meningkat sedangkan penerimaan penghasilan orang pribadi menurun. Surat ketetapan pajak kurang bayar yang dikeluarkan KPP cenderung meningkat sedangkan penerimaan penghasilan orang pribadi menurun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan pajak penghasilan orang pribadi melalui jumlah wajib pajak,penagihan pajak dan pemeriksaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1 periode 2012-2016.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif ,Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Populasi adalah 75 data laporan penerimaan pajak tahunan dan sampelnya sebanyak 30 data laporan penerimaan pajak tahunan. Metode analisis menggunakan analisis regresi berganda dengan melakukan Uji hipotesis secara parsial menggunakan (uji-t).

Hasil penelitian deskriptif yang menunjukan bahwa penerimaan penghasilan orang pribadi dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak tergolong dalam kategori sedang. selanjutnya hasil penelitian kuantitatif menunjukan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. variabel yang paling mempengaruhi penerimaan penghasilan orang pribadi adalah pemeriksaan pajak.

Keywords: Number of Taxpayers, Tax Collection, Tax Inspection and Income of personal income tax.

I. PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan dari sektor pajak sangat vital dalam rangka mensukseskan pembangunan. Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan maka setiap tahunnya Dirjen pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor paak (Rahayu, 2007). Kotribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat disetiap tahunnya (Harinurdin, 2009).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, Wajib Pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak. Semua kegiatan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan, hal tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakatnya.

Atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak, dan tentunya diperlukan kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya kepada negara sebagai salah satu bentuk kontribusi dan bentuk kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak (Moh.Zain, 2007:43).

Meningkatkan Jumlah WP untuk meningkatkan penerimaan pajak juga bisa dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah Surat paksa. fenomena pada tabel diatas menunjukan bahwa hal ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:121) yang menyatakan bahwa Surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa WP dipaksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Artinya dengan meningkatkan jumlah surat paksa bagi WP yang tidak patuh, akan meningkatkan penerimaan pajak Namun kenyataannya yang terjadi di KPP Pratama Tasikmalaya meskipun telah dilakukan meningkatkan jumlah surat paksa, tidak menyebabkan penerimaan pajak meningkat, melainkan penerimaan pajak justru menurun disaat jumlah surat paksa mengalami peningkatan.

Selain meningkatkan jumlah WP dan Jumlah surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak juga bisa dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sopjan Assauri (2012 :115) yang menyatakan bahwa Surat ketetapan pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), hal ini karena SKPKB merupaka salah satu sarana atau alat untuk menagih pajak, dan pada umumnya wajib pajak akan segera melunasi hutang pajaknya, upaya tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak. Artinya dengan meningkatkan jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang akan diterbitkan, akan meningkatkan penerimaan pajak Namun kenyataannya yang terjadi di KPP Pratama Tasikmalaya meskipun telah dilakukan meningkatkan jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), tidak menyebabkan penerimaan pajak meningkat, melainkan penerimaan pajak justru menurun disaat jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) mengalami peningkatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1) Apakah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak.
2) Apakah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Penagihan Pajak.
3) Apakah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji sebuah pernyataan prediksi yang menghubungkan *independent variable* terhadap *dependent variable* (Kothari, 2008). Yaitu menganalisa seberapa besar Penerimaan Pajak Penghasilan Orang PribadiMelalui Jumlah Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui ada tidaknya Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadidipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak.
2) Untuk mengetahuiada tidaknya Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadidipengaruhi oleh Penagihan Pajak.
3) Untuk mengetahuiada tidaknya Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadidipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah- masalah yang terjadi,serta bahan pertimbangan bagi Kanwil DJP Jabar 1 yang menjadi objek penelitian dalam menjalankan

operasinya khususnya untuk mengetahui pengaruh penghasilan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadimelalui Jumlah Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukan bahwa jumlah wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, serta menambah wawasan dan pengembangan ilmu khususnya mengenai Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadimelalui Jumlah Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1Kajian Pustaka

2.1.1 Jumlah Wajib Pajak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Jumlah adalah banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:163) Wajib Pajak sebagai berikut :

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu".

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:125) penagihan pajak sebagai berikut :

"Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Pardiat (2008:11) pemeriksaan pajak sebagai berikut

"menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa bukubuku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Mardiasmo (2011:135) pajak penghasilan sebagai berikut

"Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya selama satu tahun pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak."

2.3 Kerangka Pemikir

2.3.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Abdul Jabbar Yoesoef (2013: 183) yang menyatakan bahwa:

"Secara pertumbuhan wajib pajak akan mendatangkan income negara sebanding dengan pertumbuhannya. Dengan kata lain penerimaan pajak dari wajib pajak tersebut akan semakin besar untuk modal pembangunan.

2.3.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Mardiasmo (2009:121) Menyatakan bahwa

“Surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa WP dipaksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak”.

2.3.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:248) Menyatakan bahwa:
“Pemeriksaan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia, secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. “.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011:64). Berdasarkan tujuan penelitian yang dideduksi melalui proposisi yang ada dalam paradigma penelitian, maka dideduksi hipotesis sebagai berikut:
H_1: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak
H_2 :Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Penagihan Pajak
H_3 : Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:2) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

Menurut Uma Sekaran (2006:248) unit analisis adalah tingkat pengumpulan data yang dikumpulkan selama analisis dataDengan mempertimbangkan hal diatas maka unit analisis dalam penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Wilayah DJP Jabar 1.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul penelitian yang digunakan oleh penulis Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadimelalui Jumlah Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak,maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Varabel Bebas (Independent Variable)

Variabel dalam penelitian ini adalah Jumlah Wajib Pajak(X1), Penagihan Pajak (X2) dan Pemeriksaan Pajak (X3).

2) Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y).

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena peneliti tidak mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan tetapi data yang dibutuhkan bersumber dari pihak kedua. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalu media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku perpustakaan atau data-data dari perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dokumentasi (*filling*) dengan mencatat data yang berhubungan dengan unit analisis, wawancaraatau tatap muka langsung untuk mendapatkan informasi terkait kepada pegawai Kanwil DJP dan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca buku-buku yang

berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dan membaca data-data laporan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi terkait dengan KPP Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Umi Narimawati (2008:161) mendefinisikan populasi adalah sebagai berikut "Objek atau subjek yang memiliki karakter tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian".

Maka populasi dalam penelitian ini adalah laporan pajak KPP Pratama terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jabar 1 yaitu 15 KPP Pratama dengan 5 periode persemester dalam pertahun , jadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 75 data.

3.4.2 Sampel

Adapun teknikpengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, yaitu pemilihan anggota sampel berdasarkan kriteria- kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kantor pelayanan pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jawa Barat I.
2) Tidak terdapat data yang hilang atau tidak termasuk data *outlier*.
3) Mempunyai kelengkapan data yang dibutuhkan mulai dari tahun 2012-2016.
4) Pada tahun 2012-2016, KPP pratama melaporkan laporan penerimaan pajak yang terealisasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

Berdasarkan teoridiatas jumlah sampel dalam penelitian iniyaitu 6 KPP Pratama yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat I dengan 5 periode yaitu 2012-2016. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1, yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 114, Lengkong, Kota Bandung.

3.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Januari 2017 sampai denganAgustus 2017.

3.6 Metode Pengujian Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel independen atau dependen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal, atau tidak. Jika data berdistribusi normal maka model regresi dapat digunakan.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Jika terjadi korelasi kuat, maka terdapat masalah multikolinearitas yang harus diatasi. Model regresi yang baik yaitu tidak terdapatnya multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residula suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas.Model regresi yang baik adalah model yang heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-

variabel penelitian. Jika tejadi korelasi, maka hal tersebut dinamakan adanya permasalahan autokorelasi.

3.6 Metode Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Penerapan analisis regresi berganda ini menurut Sugiyono (2005: 210), adalah "Analisis regresi linier digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya)".

2. Analisis Korelasi

Menurut Umi Narimawati (2010:49) menyatakan bahwa pengujian korelasi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel X dan Y, dengan menggunakan pendekatan koefisien korelasi Pearson.

3. Analisis Koefisiensi Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

3.7 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui Jumlah Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan PajakPada Kantor Wilayah Jawa Barat I . Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

4.1.1 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi OlehJumlah Wajib Pajak

Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungannya bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah wajib pajak maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.diperoleh nilaithitunguntukJumlah Wajib Pajak (X1) sebesar 2,073.Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = 26,maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,056. Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,073>2,056) dan dapat disimpulkan bahwa H_o ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk variabel Jumlah Wajib Pajak sebesar 0,048,artinyakesalahanuntukmengatakanada pengaruh terhadapPenerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi hanya4,8% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat di terima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak H_o.Kesimpulannya, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajaksecara signifikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.Penelitian mengenai Jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh Siti (2014) yang menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak secara signifikan.

4.1.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi olehPenagihan Pajak

Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Penagihan Pajak yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungannya bersifat positif artinya setiap kenaikan Penagihan Pajak dengan Surat Paksamaka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.diperoleh nilait$_{hitung}$untuk Penagihan Pajak (X2) sebesar 2,089.Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = 26,maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,056. Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,089>2,056) dan dapat disimpulkan bahwa H_o ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk variabel Penagihan

Pajak sebesar 0,047,artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi hanya 4,7% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat di terima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak H_o. Kesimpulannya,Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Penagihan Pajak secara signifikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Penelitian mengenai Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang telah dilakukan oleh Reida Wulan Hudany (2015) yang menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Penagihan Pajak secara signifikan.

4.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi olehPemeriksaan Pajak

Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungannya bersifat positif artinya setiap kenaikan Pemeriksaan Pajak dengan SKPKBmaka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadidiperoleh nilait_{hitung}untuk Pemeriksaan Pajak (X3) sebesar 2,297.Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = 26, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,056.Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung}>t_{tabel}$ (2,297> 2,056) dan dapat disimpulkan bahwa H_o ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0,022,artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadihanya 2,2% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat di terima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak H_o.Kesimpulannya, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh PemeriksaanPajaksecara signifikanpada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Penelitian mengenai Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang telah dilakukan oleh Evita, Wilopo dan Devi (2015) yang menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak secara signifikan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi olehJumlah Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak pada seluruh KPP Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1). Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak. Korelasi antara Jumlah Wajib PajakterhadapPenerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan Jumlah Wajib Pajak maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.artinya semakin meningkatnya jumlah wajib pajak OP yang terdaftar pada KPP, akan membuat Penerimaan Pajak Penghasilan akan meningkat, begitupun sebaliknya.

2). Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi olehPenagihan Pajak.Korelas iantara Penagihan Pajakterhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap peningkatanPenagihan Pajakmaka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.artinya semakin sedikit jumlah penerbitan surat paksa diterbitkan karena wajib pajak sudah melunasi hutang pajaknya sebelum jatuh tempo sehingga tidak ada surat tagihan pajak yang diterbitkan maka akan membuat Penerimaan Pajak Penghasilan akan meningkat.

3). Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi olehPemeriksaan Pajak. Korelasi antara Pemeriksaan Pajakterhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap peningkatanPemeriksaan Pajakmaka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.artinya semakin sedikit jumlah penerbitan SKPKB karena Wajib Pajak sudah melunasi hutang pajaknya sebelum jatuh tempo sehingga tidak ada surat tagihan pajak yang diterbitkan maka akan membuat Penerimaan Pajak Penghasilan akan meningkat.

5.2 SARAN

5.2.1 Saran Praktis :

1) Untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak, sebaiknya KPP lebih meningkatkan lagi sosialisasi atau pengarahan dengan cara mengumpulkan semua wajib pajak pada masing-masing wilayah KPP tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2) Agar Surat Paksa tidak diterbitkan maka disarankan KPP dapat melakukan himbauan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, maupun memenuhi angsuran pembayaran pajaknyasehingga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi..

3) Agar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tidak diterbitkan maka disarankan KPP agar supaya wajib pajak melakukan pengisian dengan benar terkait SPT yang akan dilaporkan sehingga Surat Ketetapan Kurang Bayar tidak perlu diterbitkansehingga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

5.2.2 Saran Akademis :

1) Bagi Pengembang Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu perpajakan, serta berkontribusi dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Jumlah wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan pajak serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca khususnya dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Jabbar Yoesoef. 2013. *Kunci Surveyor Membidik Perkembangan Industri Domestik Meningkatkan Penerimaan Pajak & Royalti.* Jakarta: PT ElexMedia Komputindo KOMPAS Gramedia

Adrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance.*Jakarta: Sinar Grafika.

Agus, Suharso.2015.*Ketentuan Umum Perpajakan*.Yogyakarta: Graha Ilmu.

Amina Lainutu (2013), *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pada Kpp Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 374-382

Andi Mulyono, Djoko.2010. *Panduan Brevet Pajak-Pajak Penghasilan Yogyakarta: Andi.*

Assauri, Sofjan. 2012. *Manajemen Pemasaran.* Jakarta: Rajawali Gramedia Pustaka Utama

Chairil Anwar Pohan. 2014. Pembahasan Komprehensif: Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Choong,K.F. & Lai,M.L.2009. Self Asesment Taxs Sistem and Compliiance Complexity :Tax Practitioner Perspectife .Oxford *Buisiness & Economics Conference Program*. 24-26 Juni 2009.

Ely Suhayati., & Siti Kurnia Rahayu.(2010). *AUDITING, Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Erly Suandi.2006.Perencanaan Pajak.Jakarta:Salemba Empat

Gunadi, 2005. *Akuntansi Pajak*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta

Harinurdin, Edwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Administrasi dan Organisasi*, Vol 16(2):h:96-104.

H.Bohari. 2003. ”Penerapan Self Assesment System dalam Sistem Perpajakan Nasional”. *Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa No.13/Tahun XI/ Januari-Maret 2003*

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Rajawali Pers.

Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu.

Imas dan Ery(2013), *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pph*. Vol. 3, No. 1, September 2012-Februari 2013.

James, Simon, Clintons, Aley. 2004. Tax Complliance, Self Assesment and Taxs Administrations. *Jurnal Of Finance And Managements In Publics Servce.* Vol.2, No. 2, p: 24-42.

Kothari, D.P dan I. J. Nagrath. 2008. *Power System Engineering. New Delhi*: Tata MCGraw-Hill Publishing Company Limited.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan, Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

_____. 2009*. Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta. Penerbit Andi

_____. 2011.*Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*,Jakarta, Penerbit Erlangga

Mohammad Zain,2007, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta

Pardiat, 2008, *Pemeriksaan Pajak,* Edisi Kedua, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.

Resmi, Siti, Dra, M.M, Akt.Edisi 6 2011.*Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat

Rusjdi, Muhammad. 2004, *PPN & PPnBM Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,*PT Indeks,Jakarta

Santoso, Singgih. 2010. Statistik *Multivariate: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Penerbit PT.Gramedia. Jakarta

Salip dan Tendy Wato. Pengaruh Pemeriksan Pajak Terhadap Peneriman Pajak (Studi Kasus: Di KPP Jakaarta Kebon Jeruk) , *Jurnall Kuangan Public*, Vol.4,No.2, September 2006.

Siti Kurnia Rahayu. 2010 .*Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

_____. 2009, *Perpajakan Indonesia*, Bandung: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Soemarso S.R. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komrehensif.* Jakarta: Salemba Empat.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2001 , *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta Bandung

_____. 2005. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.

_____. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV.Alfabeta: Bandung.

_____. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2011.*Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&*D. Bandung:Alfabeta.

_____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.Bandung : Alfabeta.

Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta

Uma Sekaran, 2006, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis,* Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori* dan *Aplikasi*. Bandung: Agung Media.

_____. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Jurnal :

Evita, Wilopo danDevi (2015), *Analisis Efisiensi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dan Tax Coverage Ratio Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak*. Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Putu Putra danI Made (2014), *Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. ISSN : 2302 – 8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.3 (2014) : 633-643.

Rahayu, Ning. 2007. Kebijakan Baru Direktorat Jendral Pajak Dalam Pengajuan Retitusi PPN dan Perencanan Pajak Untuk Menghadapi. *Jurnal Umum Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.15(1) (Januari).

Reida Wulan Hudany (2015), *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jom. FEKON Vol.2 No. 2 Oktober 2015.

Yudi, Hariyanto danSiti (2014), *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, Dan Jumlah Surat Pemberitahun Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)| Vol. 10 No. 1 Mei 2014|

Zakiah Dan Hantoro (2008), Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2 Vol. 13, Agustus 2008.

Situs Internet:

Masih Banyak Wajib Pajak tak Bayarkan Kewajibannya
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2013/03/06/225899/masih-banyak-wajib-pajak-tak-bayarkan-kewajibannya
Di akses pada 9 Mei 2017

Tunggak Pajak Rp 6,5 Miliar, Pria Asal Bandung Ini Disandera
https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3206169/tunggak-pajak-rp-65-miliar-pria-asal-bandung-ini-disandera
Di akses pada 9 Mei 2017

LAMPIRAN :

Tabel 4.8
Persamaan Regresi Linier Berganda
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,050	1.234		2.472	.020
	Jumlah_Wajib_Pajak	30958.232	14933.956	.351	2.073	.048
	Penagihan_Pajak	9.473	4.535	.330	2.089	.047
	Pemeriksaan_Pajak	6.9677	3.178	.303	2.297	.022

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak_Penghasilan_Orang_Pribadi

Tabel 4.9
Hasil Korelasi PearsonJumlah Wajib PajakdenganPenerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Correlations

		Jumlah_Wajib_Pajak	Penerimaan_Pajak_Penghasilan_Orang_Pribadi
Jumlah_Wajib_Pajak	Pearson Correlation	1	.469**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	30	30
Penerimaan_Pajak_Penghasilan_Orang_Pribadi	Pearson Correlation	.469**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.10
Hasil Korelasi Pearson Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Correlations

		Penagihan_Pajak	Penerimaan_Pajak_Penghasilan_Orang_Pribadi
Penagihan_Pajak	Pearson Correlation	1	.496**
	Sig. (2-tailed)		.001
	N	30	30
Penerimaan_Pajak_Penghasilan_Orang_Pribadi	Pearson Correlation	.496**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	
	N	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.11
Hasil Korelasi PearsonPenagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Correlations

		Pemeriksaan_Pajak	Penerimaan_Pajak_Penghasilan_Orang_Pribadi
Pemeriksaan_Pajak	Pearson Correlation	1	.561**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	30	30
Penerimaan_Pajak_Penghasilan_Orang_Pribadi	Pearson Correlation	.561**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	30	30